

PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN BUMN

Alvi Ikhsanyah Salsabilla

alvibilla27@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Eni Indriani

eni.indriani@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Nungki Kartikasari

nungkikartikasari@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dari Good Corporate Governance terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. Mekanisme GCG diukur dengan Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Saham yang Dimiliki Oleh Pemerintah. Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan BUMN tahun 2016-2020. Total populasi sebanyak 20 perusahaan, dengan menggunakan teknik purposive sampling diperoleh sebanyak 95 sampel. Data dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Saham yang Dimiliki Oleh Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan Ukuran Dewan Komisaris, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kata Kunci: mekanisme GCG, pengungkapan CSR, dewan komisaris, komite audit, struktur kepemilikan

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism of Good Corporate Governance in disclosing Corporate Social Responsibility. Good Corporate Governance in the proxy mechanism consists of the Size of the Board of Commissioners, the Proportion of the Board of Independent Commissioners, the Expertise of the Audit Committee, Managerial Ownership, and the Proportion of Shares Owned by the Government. The data is obtained from the annual report of BUMN companies for 2016-2020. A total population of 20 companies, using the purposive sampling technique obtained as many as 95 samples. Data were analyzed by multiple linear regression. The results of the study show that the Expertise of the Audit Committee and the Proportion of Shares Owned by the Government have a significant positive effect on CSR disclosure, while the size of the Board of Commissioners, the proportion of the Board of Independent Commissioners, and Managerial Ownership have no significant effect on CSR disclosure.

Keywords: GCG mechanism, CSR disclosure, board of commissioners, audit committee, ownership structure

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan telah tumbuh dan meluas baik dalam studi akademis dan praktik bisnis (Benlemlih dan Potin, 2017). Di Indonesia pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terus berkembang, seiring dengan isu kerusakan lingkungan yang terjadi. Menurut Harsono (2019:9) masih ada pihak-pihak yang belum memahami pengungkapan CSR, ini disebabkan salah satunya karena anggapan CSR adalah tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab perusahaan.

Berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi menyadarkan setiap perusahaan, termasuk perusahaan BUMN untuk lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Wujud dari keberhasilan pelaksanaan program CSR yang dijalankan oleh perusahaan BUMN adalah diterimanya penghargaan *Top Corporate Social Responsibility* oleh empat perusahaan BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Of The Year 2020. Empat perusahaan yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah PT Timah Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Bank Negara Indonesia, dan dan PT Jamkrindo. Penghargaan tersebut diterima atas kontribusi perusahaan dalam membantu keberlangsungan usaha di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia (Gunawan, 2020).

Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) tidak dapat dipisahkan dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan adanya mekanisme dan struktur *governance* diharapkan dapat mengurangi perbedaan informasi yang menyebabkan *moral hazard*, dengan konsekuensi perusahaan tidak melaksanakan praktik CSR (Waryanto, 2010). Keberadaan dewan komisaris, komite audit, serta struktur kepemilikan merupakan hal yang penting bagi perusahaan.

Dewan komisaris sebagai salah satu mekanisme GCG yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibentuk dalam rangka memberikan pengawasan serta memberikan pertunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan yang disebut sebagai pihak manajemen (Yuliani, 2019). Bagian dari dewan komisaris adalah dewan komisaris independen, melalui keputusan RUPS dengan adanya dewan komisaris independen dapat memperkuat pengawasan, karena dewan komisaris independen berasal dari pihak yang tidak memiliki hubungan sehingga lebih bersifat independen dalam pengawasan (Mizdareta, 2015). Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris membentuk beberapa komite, salah satunya adalah komite audit. Kualitas komite audit ditandai dengan keahlian yang dimiliki oleh anggota komite audit, dengan keahlian tersebut membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi *moral hazard* yang dilakukan oleh manajer (Indira dan Syafruddin, 2022). Serta dengan keahlian komite audit diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosial. Dalam mekanisme GCG juga terdapat pemisahan antara kepemilikan. Diantaranya terdapat kepemilikan manajerial dan kepemilikan oleh pemerintah. Kepemilikan manajerial dapat membantu mengurangi konflik kepentingan, karena majamen akan menyatukan kepentingannya dengan kepentingan perusahaan, salah satunya dengan praktik CSR (Waryanto, 2010). Sedangkan, dengan kepemilikan saham oleh pemerintah diperkirakan dapat mengakibatkan pengungkapan yang lebih besar tanggung jawab sosial perusahaan, karena pemerintah harus mempromosikan transparansi di antara perusahaan publik (Nugroho, 2011).

Penelitian sebelumnya untuk mengetahui pengaruh mekanisme GCG terhadap pengungkapan CSR, oleh Susilo (2015) dan Yusran et al. (2018) menemukan dewan komisaris yang diukur dengan ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Sedangkan oleh Fitri (2012) menunjukkan hasil yang berbanding terbalik, yaitu bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian oleh Susilo (2015) menggunakan variabel proporsi dewan komisaris independen menunjukkan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian oleh Indira dan Syafruddin (2022) menunjukkan hasil yang

berbanding terbalik, yaitu bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian oleh Faisal (2016) beserta Indira dan Syafruddin (2022) menunjukkan bahwa keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian oleh Nugroho (2011) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial dan proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah dapat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian oleh Rahmawati (2014) terhadap kepemilikan manajerial menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian oleh Zulfi (2014) menunjukkan hasil kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan; (2) untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan; (3) untuk menganalisis pengaruh keahlian komite audit terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan; (4) untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan; (5) untuk menganalisis pengaruh proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Legitimasi

Menurut teori legitimasi, pelaporan CSR adalah cara yang digunakan perusahaan untuk memastikan keberlanjutannya dan untuk membenarkan keberadaannya ketika ada ketidaksesuaian antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai yang biasa diterima oleh masyarakat (Chakroun et al., 2017). Dengan terlibat dalam kegiatan CSR, hal tersebut menunjukkan perusahaan serius dalam mengurangi kerugian operasi bisnis mereka, dan menggambarkan upaya mereka untuk mendapatkan respon baik bagi masyarakat (Omran dan Ramdhony, 2015). Dengan demikian legitimasi masyarakat menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan (Wiyuda dan Pramono, 2017).

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diartikan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha dari Badan Usaha, baik Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN/BUMD), Koperasi, dan lain-lain (Harsono, 2019:7). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu tindakan dan kebijakan organisasi dalam mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan dan *triple bottom line* kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan (Aguinis dan Glavas, 2012). Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) muncul sebagai konsep untuk memahami dampak faktor sosial pada operasi perusahaan (Park et al., 2015).

Good Corporate Governance (GCG)

Definisi *Corporate Governance* (CG) adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kelangsungan bisnis (Kusmayadi et al., 2015). Poudel (2015) menambahkan serangkaian tujuan, misi dan visi perusahaan berkaitan dengan pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan berbagai badan pengatur dan masyarakat pada umumnya.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara (KNKG, 2006). Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen

yang diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (KNKG, 2006).

Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite-komite diantaranya adalah komite audit. Dalam menjalankan tugasnya anggota komite audit harus mempunyai kompetensi di bidang keuangan atau akuntansi. Keahlian yang dimiliki komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pekerjaan yang dilakukannya yaitu sejauh dalam pengambilan keputusan dan efektif dalam penyelesaian pekerjaannya (Faisal, 2016).

Struktur Kepemilikan (Pemegang Saham)

Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan (FCGI, 2002). Dengan kepemilikan manajerial untuk manajer yang hanya ingin mengambil keputusan dengan keuntungan sendiri dapat berkurang dan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi seluas-luasnya (Waryanto, 2010). Dan dengan perusahaan yang didalamnya terdapat kepemilikan pemerintah akan lebih banyak memberikan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaannya (Ghazali, 2007).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan, teori legitimasi bahwa dalam pengambilan keputusan, dewan komisaris haruslah mempertimbangkan aturan dan norma yang ada (Putri dan Gunawan, 2019). Dewan komisaris memiliki kekuasaan yang besar dalam sebuah perusahaan dan bertindak menjamin manajemen bertindak sesuai dengan pemilik perusahaan (investor) dan informasi diungkapkan kepada *stakeholder*, termasuk informasi praktik CSR (Waryanto, 2010). Berdasarkan uraian, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₁ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Pengaruh Proporsi Dewan Komisari Independen terhadap Pengungkapan CSR

Komisaris independen adalah anggota dari dewan komisaris yang tidak mempunyai keterikatan dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham serta ikatan bisnis yang dapat mempengaruhi secara impenden (Utari, 2014). Dengan adanya dewan komisaris independen membantu memperkuat pengawasan (Mizdareta, 2015). Rouf (2011) menyatakan kekuatan mekanisme *corporate governance* sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah komisaris. Jika komposisi dari dewan komisaris independen semakin besar, maka kemampuan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk melindungi pemangku kepentingan akan semakin objektif dan mendorong pengungkapan CSR yang lebih luas (Waryanto, 2010). Berdasarkan uraian, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₂ : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR

Komite audit merupakan mekanisme yang penting dalam *corporate governance* karena menjadi salah satu karakteristik *corporate governance* yang efektif. Dalam menjalankan tugasnya anggota komite audit mempunyai keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi. Keahlian yang dimiliki komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pekerjaan yang dilakukannya yaitu sejauh dalam pengambilan keputusan dan efektif dalam penyelesaian pekerjaannya (Faisal, 2016). Berdasarkan keahlian tersebut membantu meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi *moral hazard* yang dilakukan oleh manajer, dan meningkatkan kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan terhadap lingkungan dan masyarakat (Indira dan Syafruddin, 2022). Berdasarkan uraian, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₃ : Keahlian Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan saham manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Fitri, 2012). Waryanto (2010) menyatakan bahwa dengan kepemilikan manajerial untuk manajer yang hanya ingin mengambil keputusan dengan keuntungan sendiri dapat berkurang dan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi seluas-luasnya. Berdasarkan uraian, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₄ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Pengaruh Proporsi Saham Oleh Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan saham oleh pemerintah memungkinkan bisnis beroperasi dengan cara yang sesuai dengan kepentingan pemerintah. Menurut Ghazali (2007) perusahaan yang didalamnya terdapat kepemilikan pemerintah akan lebih banyak memberikan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaannya. Berdasarkan uraian, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₅ : Proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mempelajari masalah dan tata cara yang ada dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (Samsu, 2017:117-118).

Sampel dan Teknik Pengumpulan Sampel

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 sampel perusahaan, sampel diperoleh dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan yaitu: (1) Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2020; (2) Perusahaan menyajikan laporan tahunan berturut-turut selama periode 2016-2020; (3) Perusahaan mengungkapkan informasi yang lengkap berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan pendekatan dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa catatan atau laporan tertulis yang tersedia tanpa melakukan perubahan terhadap data. Laporan yang tertulis dalam penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan.

Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian terdiri dari, variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR. Variabel independen yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Saham yang Dimiliki Oleh Pemerintah. Sedangkan variabel kontrol, yaitu terdiri dari Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan.

Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini menggunakan SPSS dengan tujuan membuktikan hubungan antar variabel. Model persamaan regresi adalah sebagai berikut.

$$CSR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 UDK_{i,t} + \beta_2 PDKI_{i,t} + \beta_3 KKA_{i,t} + \beta_4 KM_{i,t} + \beta_5 KP_{i,t} + \beta_6 ROA_{i,t} + \beta_7 ROE_{i,t} + \beta_8 TA_{i,t} + e$$

Keterangan :

CSR_D = Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

β₀ = Konstanta

β = Koefisien regresi berganda

UDK = Ukuran dewan komisaris

PDKI = Proporsi dewan komisaris independen

KKA = Keahlian Komite audit

KM = Kepemilikan manajerial

KP = Kepemilikan pemerintah

ROA = Return on asset

ROE = Return on equity
 TA = Total aset
 e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deksriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018:19).

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UDK	95	3,00	10,00	6,3684	1,48075
PDKI	95	20,00	66,67	41,1995	10,66912
KKA	95	0,00	1,00	0,5313	0,21362
KM	95	0,00	2,57	0,0578	0,35060
KP	95	0,00	90,02	54,7514	23,49752
ROA	95	-15,38	30,98	3,5387	6,24116
ROE	95	-142,00	39,31	4,9399	23,90347
TA	95	11,57	32,45	21,7134	5,84385
CSR	95	0,11	0,49	0,2326	0,09001
Valid N (listwise)	95				

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2022

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji analisis statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* yang apabila nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai *Asymp.Sig. > 0.05*.

Tabel 2. Hasi Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,186c,d

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2022

Hasil dari pengujian uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan *Asymp. Sig (2-tailed)* pada hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,186. Nilai tersebut di atas nilai signifikan yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, maka model regresi dapat digunakan untuk pengujian berikutnya.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah di dalam regresi terjadi korelasi antara variabel bebas atau satu sama lainnya. Jika nilai *Tolerance* $\geq 0,1$ dan *VIF* ≤ 10 , maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas bahwa variabel bebas maupun variabel kontrol dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi atau dapat dipercaya dan obyektif, hal tersebut karena hasil uji menunjukkan nilai *Tolerance* $\geq 0,1$ dan *VIF* ≤ 10 . Hasil dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

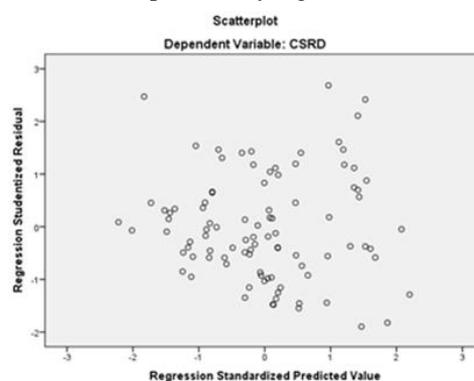
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
UDK	0,784	1,275
PDKI	0,770	1,299
KKA	0,805	1,242
KM	0,863	1,159
KP	0,789	1,268
ROA	0,669	1,494
ROE	0,810	1,234
TA	0,775	1,291

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2022

Hasil

Uji

Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat pada gambar yang ada bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, oleh karena itu dapat disimpulkan hasil uji tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	B
1 (Constant)	0,109
UDK	0,011
PDKI	0,001
KKA	0,100
KM	-0,056
KP	-0,001
ROA	-0,002
ROE	0,001
TA	0,002

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2022

Dari hasil perhitungan tabel di atas, maka dapat dibentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut.

$$\text{CSR} = 0,109 + 0,011\text{UDK} + 0,001\text{PDKI} + 0,100\text{KKA} - 0,056\text{KM} - 0,001\text{KP} - 0,002\text{ROA} + 0,001\text{ROE} + 0,002\text{TA} + e$$

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,487 ^a	0,237	0,167	0,08218

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2022

Hasil menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,167 yang berarti variasi variabel independen dan variabel kontrol, yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Saham Oleh Pemerintah, Profitabilitas (ROA dan ROE), dan Ukuran Perusahaan dapat menjelaskan dan dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu CSR sebesar 17%. Sedangkan sisanya 83% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	3,348	0,002 ^b

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2022

Dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Saham Oleh Pemerintah, Profitabilitas (ROA dan ROE), dan Ukuran Perusahaan bersama-sama mempengaruhi variabel Pengungkapan CSR.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (Uji t) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen, yaitu apabila nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak dan apabila nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima.

Tabel 7 Hasil Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1,427	0,157
UDK	1,647	0,103
PDKI	0,627	0,532
KKA	2,263	0,026
KM	-2,159	0,034
KP	-2,891	0,005
ROA	-1,455	0,149
ROE	1,319	0,191
TA	1,474	0,144

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2022

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai *t*hitung positif sebesar 1,647 dengan tingkat signifikan 0,103 > 0,05. Dengan demikian H₁ ditolak

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utari (2014), Susilo (2015), Wiyuda dan Pramono (2017), serta Yusran et al. (2018) menemukan adanya pengaruh positif antara Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR. Namun konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2012) menemukan bahwa Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR.

Penelitian ini sejalan dengan di dukung penelitian oleh Fitri (2012) menemukan bahwa Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR. Hal ini dapat disebabkan dalam pembentukan Ukuran Dewan Komisaris kurangnya memperhatikan komposisi, kemampuan dan integritas anggota, sehingga tidak dapat melakukan fungsi pengawasan, pengendalian dan tidak mampu memberikan arahan kepada manajemen dengan baik. Dengan demikian untuk mencapai Pengungkapan CSR yang lebih luas, maka pembentukan Dewan Komisaris harus memperhatikan komposisi, kemampuan dan integritas anggota, sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan, pengendalian dan mampu memberikan arahan kepada manajemen dengan baik demi kepentingan perusahaan.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki nilai t_{hitung} positif sebesar 0,627 dengan tingkat signifikan $0,532 > 0,05$. Dengan demikian H_2 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan CSR.

Hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Rahmawati (2014) dan Sembiring (2020) menemukan adanya pengaruh positif antara Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan Pengungkapan CSR. Namun konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2012) dan Susilo (2015) menunjukkan hasil bahwa tidak menemukan pengaruh yang signifikan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan CSR.

Hasil penelitian sejalan dengan di dukung penelitian oleh Utari (2014) tidak menemukan pengaruh yang signifikan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan CSR. Hal ini dapat disebabkan karena komisaris independen dalam pemilihannya tidak berdasarkan kemampuan yang dimiliki individu sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik, serta komisaris independen tidak dapat ikut serta secara langsung dalam pengambilan keputusan operasional. Dengan demikian komisaris independen tidak dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan operasional manajemen perusahaan termasuk pengungkapan CSR.

Pengaruh Keahlian Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan variabel Variabel Keahlian Komite Audit memiliki nilai t_{hitung} positif sebesar 2,263 dengan tingkat signifikan $0,026 < 0,05$. Dengan demikian H_3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa Keahlian Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap Pengungkapan CSR.

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Faisal (2016) serta Indira dan Syafruddin (2022) menunjukkan bahwa Keahlian Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun, konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Ali (2006) menunjukkan adanya pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini sejalan dengan didukung oleh penelitian Rahman dan Ali (2006) adanya pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap pengungkapan CSR. Dengan keahlian keuangan atau akuntansi yang dimiliki oleh komite audit, menunjukkan komite audit sudah mempunyai pengetahuan terkait penyusunan laporan keuangan dan audit internal. Oleh karena itu, sangat mungkin membatasi tindakan oportunistik yang dilakukan pihak manajemen. Hal ini berarti

komite audit dapat mempengaruhi kualitas pelaporan perusahaan, termasuk laporan pengungkapan CSR.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai t_{hitung} negatif sebesar -2,159 dengan tingkat signifikan $0,034 > 0,05$. Dengan demikian H_4 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan CSR.

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Fitri (2012) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR. Namun konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) beserta Viesha dan Efendi (2019) menemukan adanya pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Viesha dan Efendi (2019) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR. Hal ini mengartikan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan maka akan menimbulkan kecenderungan pihak manajemen melakukan tindakan oportunistik yang akan menurunkan nilai perusahaan termasuk dalam pelaporan CSR.

Pengaruh Proporsi Saham yang Dimiliki Oleh Pemerintah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan Proporsi Saham Oleh Pemerintah memiliki nilai t_{hitung} negatif sebesar -2,891 dengan tingkat signifikan $0,005 < 0,05$. Dengan demikian H_5 diterima dan dapat disimpulkan bahwa Proporsi Saham Oleh Pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap Pengungkapan CSR.

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Zulfi (2014) yang dimana proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) dan Indarwati (2015) menemukan adanya pengaruh antara Proporsi Saham yang Dimiliki Oleh Pemerintah terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini di dukung penelitian sebelumnya oleh Indarwati (2015) menunjukkan kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan adanya kepemilikan saham oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kepentingan politis bukan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga terjadinya kurang kontrol dari pihak pemerintah. Berdasarkan hal tersebut dapat memperlambat kinerja perusahaan termasuk dalam penyampain informasi yang berkaitan dan pelaporan CSR.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menunjukkan Keahlian Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Saham yang Dimiliki Oleh Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan Ukuran Dewan Komisaris dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada indeks pengungkapan, yaitu tidak dapat ditentukan secara tepat dikarenakan setiap unsur pada laporan perusahaan maupun laporan keberlanjutan bersifat subjektivitas, sehingga pentuan indeks untuk indikator pada setiap peneliti dapat berbeda. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah beberapa variabel, mengganti variabel kontrol, dan dapat memilih objek lain atau menambah objek penelitian sehingga sampel yang didapatkan lebih banyak.

REFERENSI

- Aguinis, H., & Glavas, A. (2012). What We Know and Don't Know About Corporate Social Responsibility: A Review and Research Agenda. *Journal of Management*, 38(4), 932–968. <https://doi.org/10.1177/0149206311436079>
- Benlemlih, M., & Girerd-Potin, I. (2017). Corporate social responsibility and firm financial risk reduction: On the moderating role of the legal environment. *Journal of Business Finance and Accounting*, 44(7–8), 1137–1166. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12251>
- Chakroun, R., Matoussi, H., & Mbirki, S. (2017). Determinants of CSR disclosure of Tunisian listed banks: A multi-support analysis. *Social Responsibility Journal*, 13(3), 552–584. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2016-0055>
- Faisal, O. (2016). *Pengaruh Komite Audit Sebagai Struktur Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dalam Sustainability Report*.
- Fitri, G. N. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Forum Corporate Governance Indonesia, (FCGI). (2002). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*.
- Ghazali, N. A. M. (2007). Ownership structure and corporate social responsibility disclosure: Some Malaysian evidence. *Corporate Governance*, 7(3), 251–266. <https://doi.org/10.1108/14720700710756535>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Sembilan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, I. (2020). *Empat BUMN Raih Top CSR, Perusahaan Mana Saja?* www.bumninc.com. <https://bumninc.com/empat-bumn-raih-top-csr-perusahaan-mana-saja/?showall>
- Harsono, S. (2019). *COMDEV (Community Development), CSR (Corporate Social Responsibility) dan PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) Dalam Harapan, Kendala dan Pelaksanaannya*. Kalika Sleman. <https://books.google.co.id/books?id=u7TwDwAAQBAJ>
- Indarwati, P. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 6(1).
- Indira, M., & Syafruddin, M. (2022). *Pengaruh Karakteristik Dewan dan Komite Audit Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. 11, 1–10.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pemoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance* (I. Firmansyah (ed.); 1st ed.).
- Mizdareta, S. (2015). Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Latar Belakang Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 1–20.

- Nugroho, M. . F. F. A. (2011). *Analisis Hubungan Antara Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.*
- Omran, M. A., & Ramdhony, D. (2015). Theoretical Perspectives on Corporate Social Responsibility Disclosure: A Critical Review. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 5(2), 38. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v5i2.8035>
- Park, Y. R., Song, S., Choe, S., & Baik, Y. (2015). Corporate Social Responsibility in International Business: Illustrations from Korean and Japanese Electronics MNEs in Indonesia. *Journal of Business Ethics*, 129(3), 747–761. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2212-x>
- Poudel, R. L. (2015). Relationship Between Corporate Governance and Corporate Social Responsibility: Evidence From Nepalese Commercial Banks. *Journal of Nepalese Business Studies*, 9(1), 137–144. <https://doi.org/10.3126/jnbs.v9i1.14603>
- Putri, E. I., & Gunawan, B. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Di Perusahaan Property Dan Real Estate. *Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah Paper*, 40, 388–406.
- Rahman, R. A., & Mohamed Ali, F. H. (2006). Board, audit committee, culture and earnings management: Malaysian evidence. *Managerial Auditing Journal*, 21(7), 783–804. <https://doi.org/10.1108/02686900610680549>
- Rahmawati, I. (2014). *Analisis Hubungan Antara Corporate Governance , Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan.*
- Rouf, M. A. (2011). The Corporate Social Responsibility Disclosure: A Study of Listed Companies in Bangladesh. *Business and Economics Research Journal*, 2(3), 19–32.
- Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In Rusmini (Ed.), *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)* (1st ed.).
- Sembiring, E. R. (2020). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(2), 145–168. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i2.2089>
- Susilo, M. S. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(5), 1–16.
- Utari, M. D. (2014). Analisis Pengaruh Kriteria Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Sub-Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 3(1), 53–80.
- Viesha, N., & Efendi, D. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Saham Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.*
- Waryanto. (2010). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia. *Skripsi*, 1–145.

- Wiyuda, A., & Pramono, H. (2017). *Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Terdaftar di BEI*. XV(1), 12–25.
- Yuliani. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Kompas 100. *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Yusran, I. A. R., Kristanti, D. F. T., & Aminah, W. (2018). Pengaruh Indikator Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Proceeding of Management*, 5(1), 621–627.
- Zulfi, N. M. (2014). *Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012)*. September.